

Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan PT NS Bluescope Indonesia

DENNY PUTRI HAPSARI, SYAMSUDIN

ABSTRAK

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* pada PT NS Bluescope Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara prinsip-prinsip GCG tersebut terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *balanced scorecard*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan adalah sangat baik/ sangat efektif, dan secara simultan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Kinerja perusahaan, *Balanced scorecard*

PENDAHULUAN

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Tuntutan terhadap wujud GCG di setiap sektor (publik maupun swasta) kini semakin gencar. Tuntutan ini memang sangat wajar, mengingat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi yang luar biasa di negeri ini, ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia. Indikasi buruknya pengelolaan tersebut antara lain tercermin dari berbagai indikator berikut : (Zarkasyi, M.W (2008). *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfabeta)

(1) Tahun 1998, secara umum hasil survei Booz-Allen dan Hamilton menyatakan bahwa belum efektifnya pelaksanaan GCG di Indonesia adalah yang paling rendah di Asia Timur. Asian Development Bank juga mengemukakan bahwa fenomena yang sering dijumpai pada perusahaan-perusahaan di Indonesia antara lain belum melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional, karena konsentrasi kepemilikan oleh pihak

tertentu yang memungkinkan terjadinya afiliasi antar pemilik, pengawas dan pengelola perusahaan, serta tidak berfungsinya Dewan Komisaris Perusahaan.

(2) Tahun 1999, di sektor swasta, menurut hasil riset McKinsey & Company yang melibatkan para investor di Asia, Eropa dan Amerika Serikat terhadap lima negara di Asia, menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sedangkan menurut hasil survei yang dilakukan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) terhadap pelaku bisnis asing di Asia ternyata Indonesia merupakan negara terburuk dibidang *corporate governance*.

(3) Tahun 2001, hasil survey yang dikembangkan oleh *Credit Lyonnais Securities* dengan tujuh kategori, meliputi disiplin, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan kesadaran nasional terhadap standar GCG pada 115 perusahaan di 25 negara berkembang menunjukkan bahwa skor total untuk perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya 37,7 dari skala 0-100 (100 adalah yang tertinggi). Skor ini lebih rendah dibandingkan dengan skor total perusahaan yang di survey di negara Singapura (64,5), Malaysia (56,6), India (55,6), Thailand (55,1), Taiwan (54,6), Cina (49,1), Korea (47,1) dan Filipina (43,9).

Penilaian kinerja perusahaan yang diukur melalui aspek keuangan adalah dengan mengacu pada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu periode yang telah berlalu (*past performance*), serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. (Irham,2011).

Penilaian berdasarkan aspek non keuangan mengacu pada sistem pengukuran kinerja yang dirancang oleh Robert S Kaplan dan David P Norton yang dikenal sebagai *balanced scorecard*. *Balanced scorecard* memiliki keistimewaan dalam hal pengukurannya yang komprehensif, karena juga mempertimbangkan kinerja dalam aspek non keuangan.

Salah satu penelitian yang mencoba menguji implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan hubungannya terhadap kinerja yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andira (2012). Penelitian tersebut menguji implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan hubungannya terhadap kinerja perusahaan baik secara simultan maupun parsial.

Analisis empiris penelitiannya didasarkan pada survey data dari seluruh staf PT. United Tractors Tbk. Cabang Makasar yang berjumlah 50 orang. Hasil utama penelitian tersebut yaitu pertama, Andira menemukan bahwa secara simultan implementasi *Good Corporate Governance* berhubungan dengan kinerja perusahaan. Kedua, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial implementasi *Good Corporate Governance* berhubungan dengan kinerja perusahaan. Ketiga, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. United Tractors Cabang Makasar pelaksanaannya sangat baik 86,10% sedangkan kinerja 86,96% sangat baik dan sangat efisien.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. NS Bluescope Indonesia ?
2. Bagaimana kinerja PT. NS Bluescope Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja PT. NS Bluescope Indonesia?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *agency theory*, yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976). Hubungan antara pengukuran kinerja dengan *good governance* merupakan kajian yang menarik jika dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya adalah dari sudut pandang teori keagenan (*agency theory*). Pada awalnya teori keagenan ini berkembang karena adanya kebutuhan untuk menjelaskan kecenderungan perilaku manajer dan pemilik yang melakukan suatu perjanjian kontrak untuk keberlangsungan suatu perusahaan (hubungan keagenan). Jansen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara pemilik, dalam hal ini disebut *principal* dengan manajemen sebagai *agent* untuk menjalankan beberapa jasa atas kepentingan yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada *agent*.

Menurut teori keagenan, untuk mengatasi ketidaksetaraan atau ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, salah satunya adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). (Kesuma, S.A:2005)

Good Corporate Governance

1. Konsep Dasar *Corporate Governance*

Pembicaraan mengenai *corporate governance* tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan sistem korporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (*expertise*), tenaga untuk manfaat bersama. (Hunger dan Wheelen, 2003). Definisi tersebut secara implisit telah menyinggung mengenai pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan terbentuknya suatu korporasi : para investor (*shareholders*) yang memberi kontribusi berupa modal yang adakalanya diperoleh dari para kreditor (perbankan), para manajer (*management*) yang memberi kontribusi berupa keahlian dan para karyawan dengan kontribusi tenaga.

Konsep pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) para pemegang saham dan pengendalian (*control*) para manajemen dalam korporasi telah menjadi suatu kajian sejak tahun 1930-an. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini adalah apakah para dewan (dewan komisaris dan dewan direksi) bertindak dengan sesungguhnya bagi kepentingan para pemegang saham ? Oleh sebab itu para penganjur *agency theory* di tahun 1970-an mengatakan bahwa para dewan (agen yang mewakili para pemegang saham) secara rasional akan bertindak bagi kepentingan mereka, dan bukan dengan bijaksana dan adil bertindak bagi kepentingan para pemegang saham. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem *checks and balances* untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

2. Pengertian *Good Corporate Governance*

Banyak terdapat definisi yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang *corporate governance*, yang diberikan baik oleh institusi (*institutional*) maupun perorangan (*individual*).

Berikut beberapa definisi GCG baik menurut institusi maupun individu :

- *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2002) memberikan definisi *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- Cadbury Commite (2003) memandang *corporate governance* sebagai: *A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibility.*(Tjager, 2003).
- *Organization for Economic and Development (OECD)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai : *One key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence that involves a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders and also provides the structure through which the objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.* (OECD, 2004)
- Bank Dunia memberikan definisi GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Effendi, 2008)
- Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tahap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada dasarnya adalah mengenai suatu sistem, prosedur, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi untuk tercapainya tujuan organisasi. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

3. Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip *corporate governance* berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini antara lain: Chandra, Aditiawan. (2007). *Membangun Tatakelola Perusahaan Menurut Prinsip-Prinsip GCG*. Diakses pada 2 Desember 2013 dari businessenvironment.wordpress.com

a. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

b. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis.

c. Keterbukaan (*transparency*)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

d. Kewajaran (*fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

e. Kemandirian (*independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

2.1.2.4 Tahap-Tahap Penerapan GCG

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan, adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi

dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut (Chinn,2000;Shaw,2003).

Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama : 1) *awarness building*, 2) *GCG assesment*, dan 3) *GCG manual building*. *Awarness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

GCG assesment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, *GCG assesment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

GCG manual building, adalah langkah berikutnya setelah *GCG assesment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan *manual* atau pedoman implementasi GCG dapat dilakukan. Penyusunan *manual* dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. *Manual* ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan *manual* untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti :

- Kebijakan GCG perusahaan
- Pedoman GCG bagi para organ-organ perusahaan
- Pedoman perilaku
- *Audit commitee charter*
- Kebijakan *disclosure* dan transparansi
- Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
- *Roadmap* implementasi

Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki *GCG manual*, langkah selanjutnya adalah menilai implementasi penerapannya di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama, yakni :

1. **Sosialisasi**, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai *GCG champion* di perusahaan.
2. **Implementasi**, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change*

management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

3. **Internalisasi**, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG didalam seluruh proses bisnis perusahaan, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada.

Kinerja Perusahaan

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. (Andira, 2012). Kinerja perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dan aspek non keuangan. Dari aspek keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dan sering menjadi perhatian utama bagi para pemakai informasi laporan keuangan, sedangkan dari aspek non keuangan bisa dilihat dari aspek pelanggan, bisnis internal, aspek pembelajaran dan pertumbuhan.

Penilaian kinerja keuangan perusahaan umumnya menggunakan analisis likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kelebihan pengukuran dengan metode tersebut adalah kemudahan dalam perhitungannya selama data historis tersedia. Sedangkan kelemahannya adalah metode tersebut tidak dapat mengukur kinerja perusahaan secara akurat. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan adalah data akuntansi yang tidak terlepas dari penafsiran atau estimasi yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam distorsi sehingga kinerja keuangan perusahaan tidak terukur secara tepat dan akurat.

➤ **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007, hal 7) :

” Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau

laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu laporan keuangan berfungsi untuk:

- a. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, hutang serta modal yang dikenal dengan nama Neraca (*Balance Sheet*).
- b. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan, biaya serta laba atau rugi yang diperoleh yang dikenal dengan nama Laporan Laba Rugi (*Income Statement*).
- c. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan, yang dikenal dengan nama Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Owners Equity atau Statement of Stockholders Equity*)
- d. Setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya namun saling berkaitan karena mencerminkan aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa lain yang sama.

(Thahir: 2008)

Rasio Likuiditas

Secara umum tujuan utama penggunaan rasio keuangan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Namun, di samping itu dari rasio likuiditas dapat diketahui hal-hal lain yang lebih spesifik yang juga masih berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menganalisa kondisi keuangan suatu perusahaan dalam menghitung tingkat likuiditas diperlukan suatu alat ukur. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan penulis untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan adalah Rasio Lancar (*Current Ratio*).

Current Assets

Current Ratio = $\frac{\text{—————}}{\text{—————}}$ X 100%

Current Liabilities

Rasio lancar ini menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety*) kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan rasio lancar yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang, sehingga

tingkat perputaran persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih.

Rasio Rentabilitas/Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang juga dikenal dengan nama rasio rentabilitas.

Munawir (2007 : 33) menyebutkan bahwa rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets*(ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

$$ROA = \frac{\text{Profit Income After Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100$$

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil untuk periode saat itu. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan.

➤ **Aspek Pelanggan**

Aspek Pelanggan dapat diukur dengan lima aspek utama (Kaplan, 1996):

- a. Pengukuran Pangsa Pasar
- b. Pengukuran *Customer Retention*
- c. Pengukuran *Customer Acquisition*
- d. Pengukuran *Customer Satisfaction*
- e. Pengukuran *Customer Profitability*

➤ **Aspek Bisnis Internal**

Perspektif Bisnis Internal dapat diukur dengan tiga aspek utama yaitu :

- a. Proses Inovasi (penelitian dasar dan terapan juga penelitian pengembangan produk)
- b. Proses Operasi (menitikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi dan ketepatan waktu dari barang/jasa yang diberikan kepada konsumen).
- c. Pengukuran terhadap efisiensi waktu yang dibutuhkan (*time measurements*)

➤ **Aspek Pertumbuhan dan Pembelajaran**

Betapa pentingnya untuk terus memperhatikan karyawan, memantau kesejahteraannya, meningkatkan pengetahuan karyawan yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan untuk mencapai hasil ketiga perspektif di atasnya.

Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan

Dengan adanya penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan maka menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, yaitu : (Wardani, 2009)

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *shareholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama dari hasil privatisasi.

Kinerja perusahaan ditentukan oleh sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *good corporate governance*. Perusahaan yang terdaftar dalam skor peneringkatan *corporate governance* yang dilakukan oleh IICG telah menerapkan *good corporate governance* dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya. Semakin tinggi penerapan *corporate governance* yang diukur dengan *corporate governance indeks perception* semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

Berdasarkan masalah penelitian dan telaah literature, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

“Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*transparency, accountability, responsibility, fairness, independency*) berpengaruh terhadap kinerja PT. NS Bluescope Indonesia”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bersifat kausalitas. Studi kausalitas adalah suatu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat disamping mengukur kekuatan hubungannya. Dengan kata lain, studi kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat. Berdasarkan sifat

dari penelitian ini, maka pengujian hipotesis menggunakan analisa regresi berganda, karena dalam pengujian ini ada lebih dari satu variabel independen.

Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu (1) variabel independen yaitu prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang terdiri dari *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *fairness*, *independency* dan (2) variabel dependen yaitu kinerja perusahaan.

Pengukuran masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip *good corporate governance*

- X1 Transparansi (*transparency*)
- X2 Akuntabilitas (*accountability*)
- X3 Responsibilitas (*responsibility*)
- X4 Kewajaran (*fairness*)
- X5 Kemandirian (*independency*)

2. Kinerja Perusahaan (Y)

Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan diukur berdasarkan :

- Aspek keuangan
- Aspek pelanggan
- Aspek bisnis internal
- Aspek pembelajaran dan pertumbuhan

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. NS Bluescope Indonesia. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2008),85

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 36 orang responden yaitu karyawan PT. NS Bluescope Indonesia.

Tabel 1
Nilai Kategori Jawaban Skala Likert

Kategori Jawaban	Skor
Sangat Baik	5
Baik	4
Cukup Baik	3
Buruk	2
Sangat Buruk	1

(Sugiyono:2010)

Untuk mengetahui gambaran penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan kinerja perusahaan dengan pendekatan *balanced scorecard*, maka dilakukan perhitungan rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden yang kemudian dibandingkan dengan skor maksimal, dan selanjutnya dibandingkan dengan tabel interpretasi skor seperti berikut :

Tabel 2
Interpretasi Skor

Hasil	Kategori
20% - 35,99%	Tidak baik/Tidak efektif
36% - 51,99%	Kurang baik/Kurang efektif
52% - 67,99%	Cukup baik/Cukup efektif
68% - 83,99%	Baik/Efektif
84% - 100%	Sangat baik/Sangat efektif

(Sugiyono : 2010)

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari penyebaran kuisisioner data tanggapan 36 responden tentang implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*(*transparency, accountability, responsibility, fairness, independency*)dideskripsikan dalam tabel dibawah ini. Kemudian hasil jawaban responden tersebut diolah untuk memperoleh skor dari pernyataan dengan menggunakan *weight mean score*.

Tabel 3
Persentase Skor Kuisisioner Variabel X

Jenis Variabel	Persentase Skor	Kategori
Transparency (X1)	86,22 %	Sangat Baik/Sangat Efektif
Accountability (X2)	85,33 %	Sangat Baik/Sangat Efektif
Responsibility (X3)	85,89 %	Sangat Baik/Sangat Efektif
Fairness (X4)	85,56 %	Sangat Baik/Sangat Efektif

Independency (X5)	83,56 %	Sangat Baik/Sangat Efektif
Kinerja (Y)	86,50 %	Sangat Baik/Sangat Efektif

Dari tabel di atas dapat terlihat nilai skor masing-masing variabel X menunjukkan bahwa secara umum implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) adalah **sangat baik/sangat efektif**.

Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) dan *Current Ratio* (CR). Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2012 dan tahun 2013.

Tabel 4

Return On Assets

Tahun	Laba Setelah Pajak (\$)	Total Aset (\$)	ROA (%)
2012	(1.027.900.000)	6.733.500.000	(15,265%)
2013	(62.600.000)	7.330.800.000	(0,854%)

Dari tabel 4 di atas, dapat terlihat bahwa pada tahun 2012 dan 2013 perusahaan mengalami kerugian, yaitu \$ 1.027.900.000 pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 kerugian perusahaan lebih kecil bila dibandingkan tahun 2012 yaitu \$ 62.600.000. Ini berarti kinerja perusahaan meningkat di tahun 2013. Jika dilihat dari total aset perusahaan, tahun 2013 laporan keuangan perusahaan menunjukkan peningkatan jumlah asetnya, dari \$ 6.733.500.000 di tahun 2012 meningkat menjadi \$ 7.330.800.000. Sehingga hasil perhitungan ROA yang dihasilkan bertanda negatif, meskipun demikian terjadi peningkatan nilai ROA di tahun 2013.

Tabel 5

Current Ratio

Tahun	Total Current Assets (\$)	Total Current Liabilities (\$)	CR
2012	2.567.100.000	1.802.200.000	142,44%
2013	2.941.300.000	1.668.800.000	176,252%

Tabel 5 memperlihatkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan total aset lancarnya di tahun 2013, yaitu dari \$ 2.567.100.000 di tahun 2012 menjadi \$ 2.941.300.000 pada tahun 2013 dan penurunan nilai total kewajiban lancarnya dari \$ 1.802.200.000 di tahun 2012 menjadi \$ 1.668.800.000 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan kinerjanya pada tahun 2013. Nilai *current ratio* yang dihasilkan juga mengalami peningkatan, yaitu dari 142,44% di

tahun 2012 menjadi 176,252% di tahun 2013. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin membaik pada tahun 2013 jika dibandingkan kinerja keuangan tahun 2012.

KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data hasil jawaban kuisioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai implementasi prinsip-prinsip GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *fairness* dan *independency* serta pernyataan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dari 36 responden dengan menggunakan program IBM SPSS 20, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai koefisien determinan sebesar 0,526 mempunyai arti bahwa variabel prinsip-prinsip GCG memiliki kontribusi sebesar 52,6 % terhadap naik atau turunnya kinerja perusahaan dan sebesar 47,4 % dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Nilai koefisien korelasi *transparency* sebesar 0,422 menunjukkan bahwa implementasi *transparency* memiliki keeratan hubungan yang cukup kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Nilai koefisien regresi *transparency* sebesar 2,840 berarti bahwa variabel tersebut memberikan pengaruh yang searah terhadap kinerja perusahaan. Sehingga jika terjadi peningkatan nilai variabel *transparency* satu satuan, maka akan menaikkan pengaruh terhadap kinerja perusahaan sebesar 2,840 dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk uji t, nilai t-hitung (3,317) > t- tabel (2,039) yang berarti bahwa variabel *transparency* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 5\%$ atau dapat dilihat dari nilai sig 0,002 < 0,05.
3. Nilai koefisien korelasi *accountability* sebesar 0,835 menunjukkan bahwa implementasi *accountability* memiliki keeratan hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Nilai koefisien regresi *Accountability* sebesar 0,260 berarti bahwa variabel tersebut memberikan pengaruh yang searah terhadap kinerja perusahaan. Sehingga jika terjadi peningkatan nilai variabel *Accountability*, maka akan menaikkan pengaruh terhadap kinerja perusahaan sebesar 0,260 dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk uji t, nilai t-hitung (0,744) < t- tabel (2,039) yang berarti bahwa variabel *accountability* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 5\%$ atau dapat dilihat dari nilai sig 0,463 > 0,05.
4. Nilai koefisien korelasi *responsibility* sebesar 0,325 menunjukkan bahwa implementasi *responsibility* memiliki keeratan hubungan yang cukup kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Nilai koefisien regresi *responsibility* sebesar 1,322 berarti bahwa variabel tersebut memberikan pengaruh yang searah terhadap kinerja perusahaan. Sehingga jika terjadi peningkatan nilai variabel *responsibility*, maka akan menaikkan pengaruh terhadap kinerja perusahaan sebesar 1,322 dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk uji t, nilai t-hitung (2,073) > t- tabel (2,039) yang berarti bahwa variabel *responsibility*

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 5\%$ atau dapat dilihat dari nilai sig $0,053 \leq 0,05$.

5. Nilai koefisien korelasi *fairness* sebesar 0,913 menunjukkan bahwa implementasi *fairness* memiliki keeratan hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Nilai koefisien regresi *fairness* sebesar 1,676 berarti bahwa variabel tersebut memberikan pengaruh yang searah terhadap kinerja perusahaan. Sehingga jika terjadi peningkatan nilai variabel *fairness*, maka akan menaikkan pengaruh terhadap kinerja perusahaan sebesar 1,676 dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk uji t, nilai t-hitung (3,247) > t- tabel (2,039) yang berarti bahwa variabel *fairness* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 5\%$ atau dapat dilihat dari nilai sig $0,003 < 0,05$.
6. Nilai koefisien korelasi *independency* sebesar 0,845 menunjukkan bahwa implementasi *independency* memiliki keeratan hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Nilai koefisien regresi *independency* sebesar 0,289 dan bertanda negatif berarti bahwa variabel tersebut memberikan pengaruh yang berlawanan arah terhadap kinerja perusahaan. Sehingga jika terjadi peningkatan nilai variabel *independency*, maka akan menurunkan pengaruh terhadap kinerja perusahaan sebesar 0,289 dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk uji t, nilai t-hitung (0,787) < t- tabel (2,039) dan bertanda negatif yang berarti bahwa variabel *independency* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 5\%$ atau dapat dilihat dari nilai sig $0,473 > 0,05$.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. NS Bluescope Indonesia tentang implementasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governanced* dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan didapat hasil, bahwa implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik/efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin baik/efektif penerapan *corporate governance*, semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA) dan *Current Ratio* (CR) juga menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mengalami peningkatan dari kinerja periode sebelumnya. Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, Ayu. 2009. *Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT United Tractors Tbk. Cabang Makasar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar.
- Bhagat, Sanjai dan Brian Bolton. 2007. *Corporate Governance and Firm Performance*. (Online), (<http://www.sciencedirect.com>), diakses tanggal 1 September 2013
- Brown, Lawrence dan J.Caylor.2006. *Corporate Governance and Firm Valuation*.(Online), (<http://www.ssrn.com>), diakses tanggal 10 Desember 2013
- Catur Budi Utama. *Dampak Krisis Keuangan Global Tahun 2008 Terhadap Ekonomi Indonesia*. diakses tanggal 15 November 2013
- Chandra, Aditiawan. (2007). *Membangun Tatakelola Perusahaan Menurut Prinsip-Prinsip GCG*. Diakses pada 2 Desember 2013 dari businessenvironment.wordpress.com
- Gunawan Sudarmanto. 2004. *Analisis Linier Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Hartono. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta. BPFE
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Universitas Diponegoro
- I. Nyoman Tjager. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta.Prenhallindo
- Kementerian BUMN. 2002. *Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M- MBU/2002 tanggal 31 Juli tentang Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN*. Jakarta. Kementerian BUMN
- Klapper, L., F dan Love, I. 2002. *Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Market*. World Bank Policy Research Working Paper 2818. (Online), (<http://www.ssrn.com>), diakses tanggal 1 September 2013
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta. KNKG
- Mas Achmad Daniri. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya*. Jakarta. Ray Indonesia

- Moelyadi. 2006. *Manajemen keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta. Salemba Empat
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2004. *The OECD Principles of Corporate Governance*. (Online), (<http://www.oecd.org>), diakses tanggal 15 November 2010
- Ristifani. 2009. *Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jakarta.
- Singgih Santoso. 2000. *SPSS: Mengolah Data Statistik Secara Profesional Versi 7.5*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta
- Sulaiman Wahid. 2002. *Jalan Pintas Menguasai SPSS 10*. Yogyakarta. Penerbit Andy
- Sutojo dan Altridge, E. J. 2008. *Good Corporate Governance – Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta. PT. DamarMuliaPustaka
- Kaihatu, Thomas S. 2006. “*Good Corporate Governance Dan Penerapannya di Indonesia*”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 8 Nomor 1 hal:2-3
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance*. Jakarta : KNKG
- Wardani, Diah Kusuma. 2008. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Widuri dan Paramita. 2007. “*Analisis Hubungan Peran Budaya Perusahaan Terhadap Penerapan GCG*”. *Jurnal The Winner*. Volume 8 No. 2 hal : 6-7.
- Yudha Pranata. 2007. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Zarkasy, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung. Alfabeta